

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kewajibann untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga Negara Indonesia. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk dan harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Kedua peristiwa tersebut harus dicatat dan dilaporkan supaya mendapatkan perlindungan dan pengakuan terhadap warga negaranya.

Dokumen dan identitas kependudukan sangat penting baik bagi penduduk maupun Negara yang bersangkutan. Negara yang bersangkutan dapat memperoleh data-data kependudukan yang berguna untuk merencanakan program pembangunan. Tanpa adanya data kependudukan maka pemerintah akan kesulitan untuk menentukan arah pembangunan nasional. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 58 Ayat (4) disebutkan bahwa data

kependudukan dimanfaatkan untuk beberapa hal, diantaranya: 1) Pelayanan publik; 2) Perencanaan pembangunan; 3) Alokasi anggaran; 4) Pembangunan demokrasi; 5) Penegakan hukum dan pencegahan criminal. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang bersangkutan.

Administrasi kependudukan yaitu salah satu pelayanan publik yang terus melekat dalam segala kegiatan atau aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Kegiatan yang membutuhkan administrasi kependudukan seperti pada saat pemilu, menikah, mendaftarkan pendidikan, mengurus surat izin usaha, surat-surat kendaraan, jaminan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Administrasi kependudukan sangat penting untuk dimiliki setiap penduduk karena akan menjelaskan identitas seseorang dan mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Kebijakan mengenai Administrasi Kependudukan diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diterbitkan pemerintah. Kebijakan tersebut menjelaskan Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meluncurkan program kebijakan dalam meningkatkan dan mewujudkan tertib

administrasi kependudukan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ Tahun 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan, pemerintah yang efektif dan efisien serta negara yang berdaya saing. Sehubungan dengan instruksi Kemendagri tersebut, pemerintah daerah diharapkan mendukung penuh program GISA dengan menciptakan ekosistem yang ideal untuk pelaksanaan GISA. Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ Tahun 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Adanya instruksi menteri tersebut diharapkan kepada Bupati/walikota dapat melaksanakan dan mensukseskan Program GISA di Daerah masing-masing.

Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sadar administrasi. Selain itu Program GISA akan memudahkan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan terutama bagi masyarakat yang wilayahnya jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) diterapkan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota. Teknis pelaksanaan GISA mengharuskan satu kecamatan terbentuk minimal satu desa/kelurahan sadar adminduk, satu kabupaten/kota harus terbentuk minimal satu kecamatan sadar adminduk, dan satu provinsi yang minimal terbentuk satu kabupaten/kota sadar adminduk. Program GISA berorientasi pada :

- 1) Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan;

- 2) Program sadar pemutakhiran data penduduk;
- 3) Program sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan;
- 4) Program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia

Instansi pemerintahan, merupakan salah satu dari penyelenggara layanan publik. Layanan dalam instansi pemerintahan memiliki berbagai macam bentuk, yaitu antara lain pada bidang administrasi kependudukan. Salah satu instansi yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah DISPENDUKCAPIL. Apabila berbicara tentang kependudukan maka erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai instansi yang berperan aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat, DISPENDUKCAPIL harus memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) Kabupaten Semarang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Semarang. Sebagai salah satu instansi penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Semarang, Dispendukcapil diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam bidang administrasi kependudukan. Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan dan mensukseskan Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) berbasis Inovasi. Langkah yang dilakukan Dispendukcapil dalam meningkatkan kualitas pelayanan salah satunya melalui inovasi. Inovasi merupakan kreasi dalam

menciptakan cara-cara baru, ide-ide baru, metoda baru atau kombinasi dari cara-cara yang sudah ada. Permenpan Nomor 30 tahun 2014 mendefinisikan inovasi pelayanan publik merupakan suatu terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang dapat memberikan suatu kebermanfaatan bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang membuat Inovasi melalui Aplikasi Desa GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan). Aplikasi Desa GISA merupakan aplikasi yang dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Inovasi DESA GISA diluncurkan pada tahun 2021 dan diterapkan di 208 Desa dan 27 Kelurahan wilayah Kabupaten Semarang. Inovasi Desa GISA merupakan bentuk partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mendukung dan mensukseskan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) yang tertera dalam Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2021. Selain Kabupaten Semarang terdapat beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Inovasi serupa yaitu

- a. Kabupaten Tegal dengan Inovasi WADUK DESA (Warung Dukcapil Desa/ Kelurahan) dilaksanakan di 76 Desa dan diluncurkan pada tahun 2022. Jenis pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, KK.
- b. Kabupaten Jepara dengan Inovasi Kios Adminduk (Kios Administrasi Kependudukan) di 60 Desa dan diluncurkan pada tahun 2023. Jenis

pelayanan yaitu KTP el, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pindah datang antar desa, Pindah datang antar penduduk.

Inovasi DESA GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) merupakan penyempurna inovasi sebelumnya seperti Aji Welas dan Aji Arum. Adanya inovasi ini membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih dekat yaitu ke Desa tidak perlu lagi datang ke DUKCAPIL. Aplikasi ini memberikan pelayanan administrasi Kependudukan seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian dan pelayanan Kartu Identitas Anak.

Tabel 1.1 Kepemilikan KIA, Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Jenis Pelayanan	2021		2022	
	Kepemilikan	Target	Kepemilikan	Target
Kepemilikan KIA	46,53%	55,00 %	45,77%	47,70%
Kepemilikan Akta kelahiran 0-18 Thn	97,57%	98,00 %	99,10%	98,50%
Kepemilikan Akta Kematian	87,30%	88,25 %	100,00 %	91,50%

Sumber : Dukcapil Kabupaten Semarang

Berdasarkan Tabel 1.1 dari ketiga jenis pelayanan yang ada dalam Inovasi DESA GISA yang belum maksimal adalah Pelayanan Kartu Identitas Anak. KIA merupakan sebuah kartu identitas resmi sebagai bukti anak berusia di bawah 17 tahun serta belum menikah untuk perlindungan dan juga pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana ketentuan dalam Permendagri No.2 tahun 2016 tentang KIA. Dengan demikian setiap anak penting untuk memiliki KIA. Kartu Identitas Anak (KIA) ini adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. Tujuan dari penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

yaitu untuk melindungi hak-hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Sebelum diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA), identitas yang dimiliki anak yang sudah memasuki bangku sekolah hanya kartu pelajar, namun bagi anak yang belum memasuki bangku sekolah identitas yang dimiliki hanya berupa akta kelahiran serta kartu keluarga. Hal ini dirasa belum bisa memberikan data diri dan juga tidak praktis. Banyak manfaat dan kemudahan yang diberikan atas kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), antara lain persyaratan dalam pendaftaran sekolah; pembuatan rekening anak; serta pemesanan tiket pesawat, sehingga tidak perlu lagi membawa KK saat melaksanakan check-in. Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi salah satu dokumen kependudukan yang masih perlu menjadi perhatian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dikarenakan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Semarang belum Optimal.

Tabel 1.2 Kepemilikan KIA di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan

Kabupaten/Kota tahun 2022

No	KABUPATEN/KOTA	USIA 0-17 (JML)	MEMILIKI (JML)	KEPEMILIKAN (%)
1	KAB. CILACAP	478.415	154.210	32,23
2	KAB. BANYUMAS	437.768	270.872	61,88
3	KAB. PURBALINGGA	259.781	121.261	46,68
4	KAB. BANJARNEGARA	259.063	142.286	54,92
5	KAB. KEBUMEN	341.125	179.704	52,68
6	KAB. PURWOREJO	178.381	141.390	79,26
7	KAB. WONOSOBO	224.751	107.756	47,94
8	KAB. MAGELANG	307.131	229.284	74,65
9	KAB. BOYOLALI	264.698	145.713	55,05
10	KAB. KLATEN	292.474	198.111	67,74
11	KAB. SUKOHARJO	211.350	119.571	56,57
12	KAB. WONOGIRI	211.853	179.402	84,68

13	KAB. KARANGANYAR	223.322	144.813	64,84
14	KAB. SRAGEN	235.059	133.099	56,62
15	KAB. GROBOGAN	364.889	297.208	81,45
16	KAB. BLORA	194.767	116.149	59,63
17	KAB. REMBANG	152.152	64.356	42,3
18	KAB. PATI	308.884	148.379	48,04
19	KAB. KUDUS	216.561	142.617	65,86
20	KAB. JEPARA	316.635	127.928	40,4
21	KAB. DEMAK	326.343	165.969	50,86
22	KAB. SEMARANG	267.615	122.499	45,77
23	KAB. TEMANGGUNG	191.460	150.786	78,76
24	KAB. KENDAL	253.073	134.366	53,09
25	KAB. BATANG	209.703	79.119	37,73
26	KAB. PEKALONGAN	265.933	165.708	62,31
27	KAB. PEMALANG	404.475	138.984	34,36
28	KAB. TEGAL	446.433	121.793	27,28
29	KAB. BREBES	526.180	187.221	35,58
30	KOTA MAGELANG	28.181	28.170	99,96
31	KOTA SURAKARTA	137.148	134.105	97,78
32	KOTA SALATIGA	46.251	38.399	83,02
33	KOTA SEMARANG	405.368	262.638	64,79
34	KOTA PEKALONGAN	80.974	48.001	59,28
35	KOTA TEGAL	74.290	48.242	64,94
	TOTAL	9.142.486	4.990.109	54,58

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Pada tabel 1.2 dapat dilihat jika kepemilikan KIA di Kabupaten Semarang pada tahun 2022 berada di urutan nomor 8 dengan kepemilikan terendah se-Jawa Tengah yaitu 45, 77%. Kepemilikan KIA terendah ada di Kabupaten Tegal dengan angka 27,28 %, kedua ada di Kabupaten Cilacap dengan angka 32,23 %, ketiga kabupaten Pemalang dengan angka 34,36 %, keempat Kabupaten Brebes dengan angka 35,58 %, kelima Kabupaten Batang dengan angka 37,73, keenam Kabupaten Jepara dengan angka 40,4 %, ketujuh Kabupaten Rembang dengan angka 42,3%, dan kedelapan Kabupaten Semarang dengan angka 45,77 %. Dari

kedelapan Kabupaten tersebut yang menerapkan Inovasi Desa Sadar Adminduk dalam mendukung Program GISA yaitu Kabupaten Tegal dengan Inovasi WADUK DESA, Kabupaten Jepara dengan Inovasi KIOS ADMINDUK, dan Kabupaten Semarang dengan Inovasi DESA GISA.

Tabel 1.3 Jumlah Kepemilikan KIA di Kabupaten Semarang berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah anak 0-17			Jumlah Kepemilikan KIA			% Kepemilikan		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Getasan	12.325	12.288	12.499	5.705	6.069	6.161	46,28%	49,39%	49,29%
2	Tengaran	18.432	18.212	18.671	6.415	6.691	7.000	35,22%	36,74%	37,49%
3	Susukan	12.562	12.462	12.758	3.264	3.548	3.571	26,19%	28,47%	27,99%
4	Suruh	18.332	18.222	18.625	7.014	7.351	7.263	38,26%	40,34%	39,00%
5	Pabelan	11.226	11.091	11.409	4.480	4.710	4.701	39,90%	42,47%	41,20%
6	Tuntang	17.116	16.916	17.222	8.412	8.748	8.836	49,72%	51,71%	51,31%
7	Banyubiru	11.211	11.026	11.221	5.406	5.913	5.818	48,22%	53,63%	51,85%
8	Jambu	10.152	10.051	10.131	6.410	6.614	6.543	63,14%	65,80%	64,58%
9	Sumowono	8.223	8.123	8.255	4.035	4.235	4.182	49,06%	52,14%	50,66%
10	Ambarawa	15.217	15.082	15.258	7.329	7.934	7.846	48,16%	52,61%	51,42%
11	Bawen	15.127	15.000	15.178	6.342	6.653	6.679	41,92%	44,35%	44,00%
12	Bringin	11.966	11.854	12.054	6.705	7.146	7.099	56,03%	60,28%	58,89%
13	Bergas	18.852	18.767	18.960	8.342	8.866	8.793	44,24%	47,24%	46,38%
14	Pringapus	14.545	14.427	14.727	6.541	6.709	6.822	44,97%	46,50%	46,32%
15	Bancak	6.304	6.153	6.197	5.029	5.171	5.063	79,77%	84,04%	81,70%
16	Kaliwungu	6.943	6.966	7.227	3.012	3.147	3.172	43,38%	45,18%	43,89%
17	Ungaran Barat	21.019	20.869	21.592	7.361	7.991	8.212	35,02%	38,29%	38,03%
18	Ungaran Timur	20.212	20.012	20.377	8.221	8.894	8.977	40,67%	44,44%	44,05%
19	Bandungan	15.201	15.122	15.254	5.102	5.815	5.761	33,56%	38,45%	37,77%
	Jumlah	264.965	262.643	267.615	115.125	122.205	122.499	43,45%	46,53%	45,77%

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Semarang Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat jika kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) di Kabupaten Semarang pada tahun 2020 sebesar 43,45% , tahun 2021 sebesar 46,53% dan pada tahun 2022 sebesar 45,77%. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di kabupaten Semarang mengalami kenaikan 3,08%, namun mengalami penurunan sebesar 0,76% pada tahun 2022. Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Semarang tahun 2021 dan tahun 2022 belum tercapai. Berdasarkan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 target capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2021 adalah sebesar 55% dan pada tahun 2022 sebesar 47,70%. Kabupaten Semarang terdiri dari beberapa kecamatan dimana setiap kecamatan memiliki kepemilikan KIA masing-masing. Seperti halnya pada Kecamatan Susukan yang menjadi kepemilikan Kartu Identitas anak (KIA) paling rendah pada tahun 2021 sebesar 28,47% dan tahun 2022 sebesar 27,99%. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Kecamatan Bancak yang menjadi Kecamatan dengan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) tertinggi pada tahun 2021 yakni sebesar 84,04% dan Tahun 2022 sebesar 81,70%. Kepemilikan Kartu Identitas anak (KIA) antara kecamatan tertinggi dan terendah memiliki kesenjangan yang cukup jauh yakni pada tahun 2021 sebesar 53,23% dan tahun 2022 sebesar 53,71%. Hal ini menandakan bahwa kepengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) masih diabaikan oleh masyarakat sehingga belum memenuhi target yang dicapai.

Adanya Desa Gisa diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan mempermudah masyarakat untuk mengurus Kartu Identitas Anak (KIA). Namun adanya inovasi Desa Gisa yang

mempermudah masyarakat untuk mengurus Administrasi Kependudukan terutama Kartu Identitas Anak (KIA) ke tingkat Desa masih belum memenuhi target kepemilikan KIA di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, pertanyaan dari penelitian ini adalah “Mengapa kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang belum tercapai?”.

Berdasarkan Permasalahan yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untu meneliti dengan judul **“Implementasi Inovasi DESA GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) Dalam Pelayanan KIA (Kartu Identitas Anak) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kepemilikan KIA periode tahun 2021 dan tahun 2022 di Kabupaten Semarang belum tercapai.
2. Kepemilikan KIA di Kabupaten Semarang mengalami penurunan di tahun 2022
3. Kartu Identitas Anak di Kabupaten Semarang berada di urutan nomor delapan terendah di Jawa Tengah

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi inovasi Desa Gisa dalam pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat Implementasi inovasi DESA GISA dalam pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tentang implementasi inovasi DESA GISA dalam pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Semarang maka tujuan dari permasalahan di atas adalah :

- a. Untuk menganalisis bagaimana implementasi inovasi DESA GISA dalam pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.
- b. Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi inovasi DESA GISA dalam pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.

1.5 Kegunaan dan Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian implementasi Inovasi Desa GISA dalam Pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Semarang adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Dari dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai program pelayanan publik dengan menggunakan berbagai inovasi sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik dan meningkatkan antusias masyarakat terhadap program tersebut

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Instansi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan untuk meningkatkan inovasi program dalam pelayanan publik yang berdampak peningkatan kepercayaan masyarakat pada setiap pemberian layanan sehingga dapat menjadikan pelayanan publik yang berkualitas.

2) Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi media informasi bagi pembaca dan menambah wawasan bagi pelajar atau masyarakat umum khususnya yang berkaitan dengan inovasi pelayanan.

3) Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengalaman dan mengaplikasikan ilmu yang telah diterima pada bidang pelayanan kepada masyarakat. Selain itu penelitian ini untuk memenuhi penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Chatreen dan Robibson (2023) "Implementasi Sistem Informasi	Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui bagaimana	Deskriptif Kualitatif	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan system informasi

	Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Tanjungbalai”	pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Tanjungbalai		administrasi kependudukan (SIAK) sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari beberapa indicator menurut van meter dan horn yaitu standard an sasaran kebijakan, sumber daya. Komunikasi dan hubungan, karakteristik agen pelaksana, kondisi social, politik dan ekonomi serta disposisi implementor.
2.	Andika Daniswara dan Suci Megawati (2023) “Implementasi Program Gapura delta Pelayanan Kependudukan Via Online (PLAVON) di desa Grabagan Kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo”	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program gapura delta pelayanan kependudukan via online (PLAVON) di desa grabagan kecamatan tulangan kabupaten sidoarjo	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa impementasi program PLAVON di Desa Grabagan sudah berjalan dengan optimal. Namun, dalam implementasinya masih tedapat beberapa kendala atau hambatan yang dilihat dari beberapa indicator menurut van Meter dan Van Horn.
3.	Dede Mardiono, dkk (2022) “Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas”	untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembuatan kartu keluarga di Kecamatan megang belum berjalan optimal. Hal in dilihat dari indicator komunikasi, sumber daya, disposisi dan

				struktur birokrasi.
4.	Mundikan, dkk (2022) “Implementasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP di UPTD Dukcapil kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin”	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kondisi implementasi kebijakan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin belum berjalan efektif sehingga belum berdampak signifikan terhadap output kebijakan.
5..	Zana Malinda Clarissa dan Suci Megawati (2022) “Implementasi Program Jadek (Jauh Jadi Dekat) Dalam Pembuatan E-Ktp Di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban”	untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program Jadek dalam penerbitan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satunya di Desa Mandirejo	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam indikator komunikasi masih belum terlaksana dengan baik. Indikator sumber daya masih belum terpenuhi. Indikator disposisi telah terlaksana dengan baik. Indikator struktur birokrasi tidak berjalan dengan baik.
6.	Listiyono, Humaizi & Heri Kusmanto (2021) “Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Di Kabupaten Langkat”	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di Kabupaten Langkat.	Deskriptif Kualitatif	Implementasi program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di Kabupaten Langkat masih kurang optimal, dikarenakan belum maksimalnya proses komunikasi, keterbatasan sumber

				daya, tidak ada anggaran pada program, dan terjadi transisi pejabat structural
7.	Nila Trisna, Putri kemala Sari, dan Safrida (2020) “Implementasi Program pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan Pilot Project di Kabupaten Aceh Barat”	Untuk mengetahui pelaksanaan program pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Pilot Project di Kabupaten Aceh Barat	Kualitatif	Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yaitu pada tiga kecamatan Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yaitu pada tiga (3) Kecamatan yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Sama Tiga dan Arongan Lambalek di Kabupaten Aceh Barat sejak 4 tahun berjalannya program PATEN, selama ini belum berjalan secara maksimal.
8.	Iqbal Aidar Idrus dan Komang Jaka Ferdian (2019) “Implementasi Pelayanan Publik Pada Program Sidukun 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di Dki Jakarta”	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan publik pada program Sidukun 3 in 1	Deskriptif Kualitatif	Pemerintah DKI Jakarta sudah berhasil melaksanakan pelayanan kependudukan pada program Sidukun 3 in 1, tetapi masih kurang dalam mesosialisasikan program tersebut Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program “SIDUKUN3 in 1”

				dalam memberikan layanan bagi anak yang dilahirkan di rumah sakit.
9.	Ramlah Alkatiri, Sri Lestari H. Gintulangi dan Olies Ahmad (2020) “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo”	Tuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo belum efektif dilihat segi pendistribusian, pemanfaatan kartu indonesia pintar yang sulit di kontrol serta data yang tidak sinkron antara desa dan pemerintah.
10.	Tepi Peirisal (2022) “Impelementasi Pelayanan Akta kematian di kabupaten Subang”	Ingin mengetahui Bagaimana Implementasi Pelayanan Akta Kematian di Kabupaten Subang?	Deskriptif Kualitatif	Implementasi Pelayanan Akta Kematian di Kabupaten Subang di tentukan oleh factor komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Pertama, penelitian Chatreen Br Simanjuntak dan Robibson Sembiring yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di kota Tanjungbalai” tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan (SIAK) dalam meningkatkan pelayanan public di Kota Tanjungbalai. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya sudah berjalan baik namun masih terdapat beberapa kendala seperti jumlah pegawai yang kurang memadai dan terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait implementasi SIAK.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andika Daniswara dan Suci Megawati berjudul “Implementasi Program Gapura delta Pelayanan Kependudukan Via Online (PLAVON) di desa Grabagan Kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo” tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program gapura delta pelayanan kependudukan via online (PLAVON) di desa grabagan kecamatan tulangan kabupaten sidoarjo. Hasil penellitian ini menunjukkan bahwa implementasi program gapura delta pelayanan kependudukan via online (PLAVON) di Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indicator menurut Van Meter dan Horn yaitu terdapat indicator yang belum optimal yaitu pada sumber daya. Sedangkan beberapa indicator lainnya sudah berjalan optimal yaitu pada indicator standard dan sasaran, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan social, ekonomi, politik dan disposisi implementor.

Ketiga, penelitian oleh Dede Mardiono, dkk dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas” tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator komunikasi yang belum berjalan optimal karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan secara langsung. Sumber daya yang belum berjalan baik karena adanya keterbatasan pada sumber daya manusia. Indikator disposisi yang masih belum optimal karena ditemukan adanya penyimpangan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mundikan, dkk yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP di UPTD Dukcapil kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin” tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metod penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana kondisi implementasi kebijakan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya belum berjalan efektif sehingga belum berdampak pada output kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, disposisi/sikap pelaksana, lingkungan sosial ekonomi, dan politik kebijakan, belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penerbitan KK dan KTP di Kabupaten Banyuasin.

Kelima, penelitian Zana Malinda Clarissa dan Suci Megawati yang berjudul “Implementasi Program Jadek (Jauh Jadi Dekat) Dalam Pembuatan E-Ktp Di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban” tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program Jadek dalam penerbitan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satunya di Desa Mandirejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam indikator komunikasi masih belum terlaksana dengan baik karena masih kurangnya sosialisasi. Indikator sumber daya masih belum terpenuhi karena kurangnya jumlah staff dan sarana prasarana kurang memadai. Indikator disposisi telah terlaksana dengan baik karena pelaksana program telah melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator struktur birokrasi tidak berjalan dengan baik dikarenakan pada aspek fragmentasi terdapat pembagian tanggung jawab pelaksanaan tugas masih dilaksanakan secara tumpang tindih.

Keenam, penelitian dilakukan oleh Listiyono, Humaizi & Heri Kusmanto dengan judul “Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun di Kabupaten Langkat” tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program GISA dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di Kabupaten Langkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Implementasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Langkat belum optimal, hal tersebut dilihat dari masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan GISA belum sepenuhnya berperan aktif dalam melaporkan peristiwa kelahiran secara sadar. Pencapaian target kepemilikan akta kelahiran masih di bawah target nasional. Kendala/Hambatan yang timbul dalam Implementasi GISA, terletak pada tahap sumber daya, sarana dan prasarana, struktur birokrasi.

Ketujuh, penelitian dilakukan oleh Nila Trisna, Putri kemala Sari, dan Safrida “Implementasi Program pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan Pilot Project di Kabupaten Aceh Barat” tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan Pilot Project di Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tiga (3) Kecamatan yang menjadi Pilot Project PATEN di Kabupaten Aceh Barat belum berjalan seperti yang amanahkan di dalam UU PATEN. Hal ini terlihat masih ada keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan PATEN di tingkat Kecamatan.

Kedelapan, penelitian oleh Iqbal Aidar Idrus dan Komang Jaka Ferdian yang berjudul “Implementasi Pelayanan Publik Pada Program Sidukun 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta” tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program SIDUKUN 3 in di DKI Jakarta. Metode dalam

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program SIDUKUN 3 in 1 sudah berjalan baik, tetapi masih kurang dalam mesosialisasikan program tersebut Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program “SIDUKUN3 in 1” dalam memberikan layanan bagi anak yang dilahirkan di rumah sakit langsung mendapatkan Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit, Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi, Kartu keluarga yang sudah update, akta kelahiran, kartu identitas anak dan BPJS Kesehatan untuk bayi.

Kesembilan, penelitian dilaksanakan oleh Ramlah Alkatiri, Sri Lestari H. Gintulangi dan Olies Ahmad dengan judul “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo” tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya programKartu Indonesia Pintar di Desa Isimu Selatan sudah baik hanya saja masih terdapat masalah. Adapun faktor penghambat dalam pelaksaannya program Indonesia pintar di Desa Isimu Selatan dilihat dari teori George Edward III dimana teori ini memiliki empat aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi.

Kesepuluh, penelitian oleh Tepi Peirisal dengan judul “Implementasi Pelayanan Akta Kematian di Kabupaten Subang” tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan akta kematian di kabupaten Subang. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi dalam pelaksanaan Surat Edaran Bupati Subang belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang menggunakan kartu kematian yang berasal dari desa masing-masing. Dari kualitas sumber daya manusia dapat memenuhi standar pelayanan. Sementara dari sarana penunjang, pihak pemerintah berupaya menyediakan ruangan yang sesuai untuk mendukung proses pelayanan. Kurangnya peninjauan dalam kegiatan sosialisasi secara langsung oleh pemerintah sehingga sosialisasi yang diharapkan belum tercapai.

Penelitian terdahulu diatas adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian ini tidak menjiplak penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini memberikan paparan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan tabel penelitian dahulu diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara penelitian dahulu dan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Terdapat beberapa kemiripan antara penelitian dahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Topik yang akan dibahas dalam penelitian ini hampir menyerupai beberapa penelitian dahulu yaitu

mengenai Implementasi Inovasi kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga sama dengan penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Van Horn dalam (Parmadi, 2018) mengemukakan terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik serta (6) sikap para pelaksana (disposisi implementor).

Penelitian ini mengambil objek yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Objek yang telah ditentukan oleh peneliti adalah Implementasi inovasi DESA GISA dalam pelayanan KIA. Selain objek, lokus dari penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yakni di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana implementasi Inovasi Desa Gisa di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Penelitian terdahulu hanya sebagai referensi, gambaran dan menunjukkan perbedaan antara penelitian dahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi berasal dari bahasa Inggris "*administration*" yang memiliki bentuk infinitifnya *to administer* yang memiliki arti

mengendalikan, mengelola atau melayani suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian administrasi menurut (Hadijaya, 2012) bahwa administrasi didefinisikan sebagai kerjasama dalam menggunakan sumber personil maupun materil secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa administrasi merupakan pengelolaan berupa informasi, manusia dan materi ke arah tujuan yang ingin dicapai.

Kata publik berasal dari bahasa inggris "*public*" yang memiliki arti masyarakat, umum atau Negara. Beberapa pakar memiliki pengertian yang berbeda dalam mengartikan kata "publik". Publik menurut Aini Nur, dkk (2020) adalah beberapa manusia yang mempunyai kesaam dalam berfikir, berperasaan, bersikap dan ebertindak dengan baik dan benar sesuai nilai normatifnya. Sementara menurut Mukarom (2015) public merupakan sekumpulan orang yang salaing berkaitan dan kesaamaan kepentingan dengan suatu organisasi yang bersifat aktif.

Mc Curdy Sawir dalam Keban (2014) menyatakan bahwa Administrasi publik diartikan sebagai proses politik yang dipandang sebagai cara mengatur suatu negara dan juga dapat dianggap sebagai cara utama menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan kata lain administrasi publik dapat juga dianggap persoalan politik. Adanya anggapan tersebut akan memunculkan kebingungan mengenai definisi dan ruang lingkup

administrasi publik. Namun, hal ini menunjukkan bahwa administrasi publik tetap dinamis, berkembang dan sulit dipisahkan dengan politik.

Menurut beberapa pakar yang dirangkum oleh penulis administrasi public dapat dijelaskan sebagai suatu kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sector swasta dan pemangku kepentingan lainnya, yang bertujuan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang rumit di dalam masyarakat.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma Administrasi public Menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2008) terdapat enam paradigma administrasi publik yang telah berkembang dengan penjelasan sebagai berikut.

Paradigma I (1900-1926) adalah paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Ahli yang terkenal dari paradigma ini adalah J. Goodnow dan White. Cara pandang ini hanya berfokus pada aspek lokus saja yaitu birokrasi pemerintah, sedangkan fokus yang perlu untuk dikembangkan tidak dijelaskan secara lebih rinci.

Paradigma II (1927 - 1937) adalah paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh yang terkenal adalah Gullick & Urwick serta Willoughby dan pemikiran mereka dipengaruhi oleh beberapa ahli manajemen klasik yakni Taylor dan Fayol. Mereka mengemukakan bahwa prinsip administrasi publik dijelaskan dalam suatu konsep yang bernama POSDCORB dan memiliki sifat yang universal.

Paradigma III (1950 - 1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Salah satu tokohnya adalah Morstein-Marx yang mengemukakan bahwa tidak mungkin politik dan administrasi dapat dipisahkan. Dalam hal ini, prinsip administrasi administrasi negara akan berlaku secara universal dimanapun itu. Lokus dari pemikiran ini adalah birokrasi pemerintahan. Pada masa ini, terjadi krisis identitas dari administrasi publik akibat peran dominan ilmu politik dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Paradigma IV (1956-1970) adalah paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Pada kondisi ini, berbagai prinsip manajemen terus dikembangkan secara lebih detail. Beberapa fokus pemikiran ini meliputi analisis 23 manajemen, perilaku organisasi, analisis sistem, riset operasi, penerapan teknologi modern dan lain sebagainya.

Paradigma V (1970-sekarang) adalah paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Pemikiran ini akhirnya mempunyai fokus dan lokus yang jelas. Fokus tersebut terdiri dari teori manajemen, organisasi dan kebijakan publik. Sementara itu, lokusnya terdiri dari berbagai kepentingan dan masalah publik.

Paradigma VI (1990-sekarang) adalah paradigma yang disebut sebagai paradigma Governance. Paradigma ini merupakan paradigma terbaru dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Governance merupakan sistem nilai, kelembagaan, dan kebijakan dengan berbagai

urusan sosial, ekonomi dan politik yang dikelola melalui kerja sama antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat (Keban, 2008). Proses dan mekanisme diutamakan dalam paradigma ini, dengan artian para masyarakat dan kelompok dapat mengetahui kepentingannya, melakukan mediasi atas perbedaan pendapat yang muncul, serta melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat berperan untuk menciptakan situasi hukum dan politik secara kondusif, sedangkan sektor swasta diharapkan dapat berperan terkait dengan penyediaan lapangan kerja, serta masyarakat dapat menyelenggarakan interaksi sosial secara sehat.

Berdasarkan teori pada paradigma administrasi publik, penelitian peneliti tergolong dalam paradigma V, yaitu: paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma 5 membahas tentang pembangunan yang berkaitan terhadap teori kebijakan publik untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Paradigma ini membahas bagaimana teori kebijakan publik dapat diterapkan guna mengatasi masalah-masalah serta kepentingan publik untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih tertib dengan mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

1.6.4 Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Idrus (2019) , kebijakan publik adalah pendayagunaan sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan

permasalahan publik atau pemerintahan. Kebijakan publik juga merupakan hasil pemikiran terhadap masalah berupa aturan yang bersifat intervensi dari pemerintah. Kebijakan publik erat kaitannya dengan keputusan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat melalui instrumen kebijakan seperti pelayanan, hukum, anggaran dan pajak. Dalam pelaksanaannya kebijakan publik melalui beberapa tahap yakni :

- 1) Agenda setting merupakan diskusi yang membahas lebih lanjut isu-isu yang tergolong isu publik. Pembahasan ini dapat berupa perencanaan prioritas permasalahan publik dan sumber daya yang tersedia bagi negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- 2) Formulasi Kebijakan Publik merupakan tahap dimana permasalahan publik mendapatkan banyak alternatif kebijakan publik dan suatu kebijakan terbaik dapat memecahkan permasalahan publik yang sedang dihadapi.
- 3) Adopsi Kebijakan Publik merupakan tahap yang bertujuan untuk mengubah solusi permasalahan menjadi kebijakan publik yang perlu dilaksanakan pemerintah melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan
- 4) Evaluasi Kebijakan Publik adalah tahap dimana pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memperoleh masukan berupa hasil atau rekomendasi output sekaligus input yang berupa rekomendasi kebijakan selanjutnya.

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah, baik dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1.6.5 Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara cermat dan rinci dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan, ketertiban, dan mengatasi permasalahan yang ada. Ripley dan Franklin dalam Gilang (2021) mendefinisikan implementasi adalah apa yang terjadi setelah penetapan undang undang dan memberikan kewenangan program, manfaat kebijakan, atau jenis manfaat spesifik lainnya. Implementasi meliputi tindakan yang dilakukan oleh banyak aktor untuk membuat program berjalan.

Majone Wildavsky dalam Daud (2018) mengemukakan implementasi sebagai evaluasi dan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Mazmanian dan Sabatier Agustino dalam Cristianingsih (2020) implementasi kebijakan mengacu pada implementasi keputusan politik yang mendasar, biasanya dalam bentuk perintah, undang-undang, dan keputusan eksekutif atau keputusan dari badan peradilan. Keputusan ini mengidentifikasi permasalahan yang akan diatasi, menyatakan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai dan menentukan cara untuk menyusun atau mengatur proses implementasi.

Dari definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi merupakan kegiatan bersifat dinamis yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan atau pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kegiatan melakukan suatu kegiatan. Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Ada beberapa model dalam implementasi kebijakan publik yang banyak digunakan dalam literatur ilmiah tentang kebijakan publik. Ada beberapa model implementasi kebijakan di antaranya yaitu

1. George C. Edward III

Menurut George C. Edward III terdapat empat variable atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Variable tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a) Komunikasi

Komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a. Transmisi
- b. Kejelasan

c. Konsistensi

b) Sumber daya

yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Indikator-indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik adalah:

- a. Staff
- b. Informasi
- c. Wewenang
- d. Fasilitas

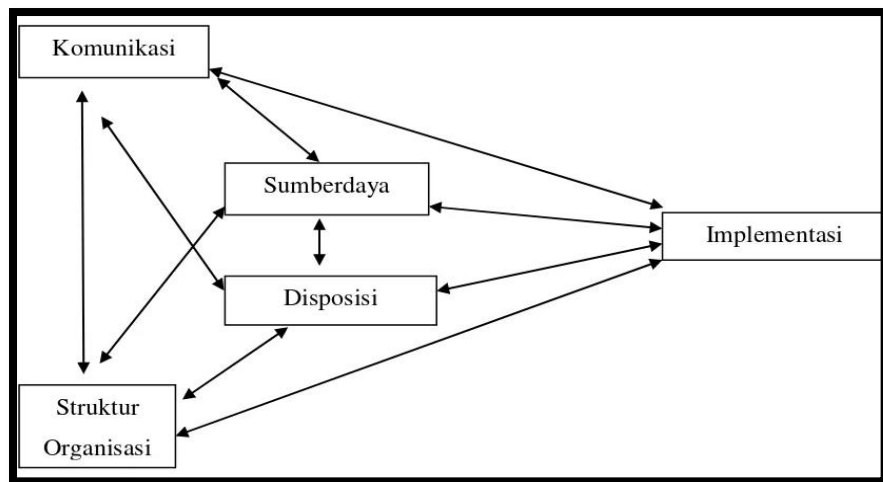
c) Disposisi

yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi menurut Edward III antara lain:

- a. Pengangkatan birokrat;
- b. Insentif
- d) Struktur birokrasi

menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan aspek ini mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standard Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

Gambar 1.1
Model implementasi kebijakan Edward III



Sumber : Edward III, 1980 dalam Anggara , 2018 : 250)

2. Merilee S. Grindle

Merilee S Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi

kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi kebijakan (context of implementation). Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal, yakni:

- a) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Sebuah kebijakan yang didalamnya memuat kepentingan kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan, daripada kebijakan yang tidak memuat kepentingan kelompok sasaran.
- b) Jenis manfaat yang diterima oleh target groups, tentunya sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari target groups.
- c) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan sebuah kebijakan dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan fisik akan lebih mudah diimplementasikan daripada kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan non fisik.
- d) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah apakah implementor kebijakan tersebut sudah tepat di serahkan kesebuah institusi.
- e) Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementoriya dengan rinci. Dalam hal ini instansi instansi yang terkait untuk sebagai implementor kebijakan.
- f) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang

memadai akan mendapat hambatan dalam tahap implementasi
Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya finansial
maupun kompetensi dari implementor

Sedangkan lingkungan implementasi mencakup tiga aspek yaitu

- a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b) Karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa.
- c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

3. Mazmanian dan Sabastier

Menurut Mazmanian dan Sabastier terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan

Karakteristik masalah (*tractability of the problems*) meliputi beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
- b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
- c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
- d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Karakteristik kebijakan mencakup beberapa hal yaitu :

- a) Kejelasan isi kebijakan.

- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
- c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut.
- d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
- e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Sedangkan variable lingkungan meliputi beberapa faktor yaitu :

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
 - b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
 - c) Sikap dari kelompok pemilih
4. Van meter dan Horn

Menurut van meter dan Horn ada enam variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu

- a) Standar dan sasaran kebijakan

Dalam setiap kebijakan publik standar dan sasaran harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada tiap-tiap program.

Karena dengan jelasnya standar dan tujuan kebijakan, maka akan dengan mudah untuk melaksanakan kebijakan. Sebaliknya akan

sering terjadi kegagalan yang disebabkan oleh tidak jelasnya apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan.

b) Sumber Daya

Keberadaan sumber daya merupakan suatu hal yang penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumber daya kebijakan yang dibuat tidak akan berjalan dengan baik dan tidak dapat menghasilkan suatu yang maksimal. sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan standar dan tujuan, sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Sumber daya dalam hal ini tidak hanya sumber daya manusia tetapi juga sumber daya anggaran dan sarana prasarana.

c) Karakteristik Organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya

d) Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi menunjuk pada karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat

memengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, netarality and rejecttion), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan

e) Komunikasi antar organisasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam terciptanya suatu kegiatan yang baik. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.

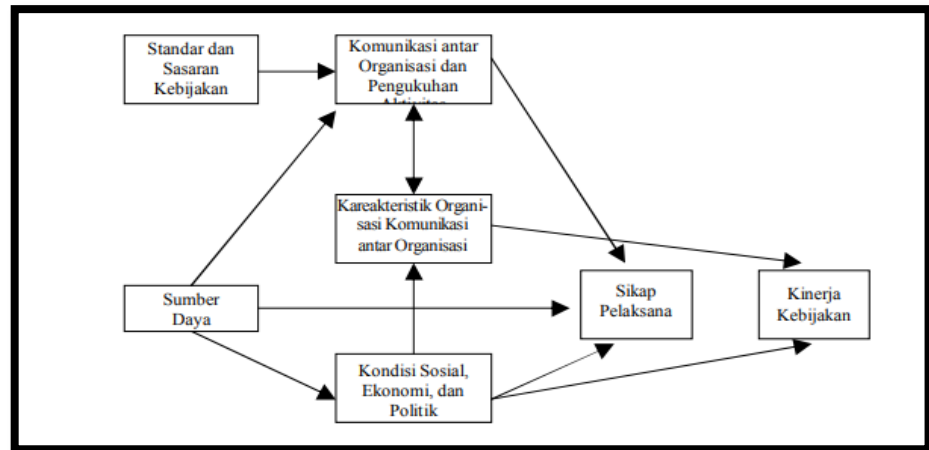
f) Lingkungan sosial, ekonomi, politik

sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Keikut campuran lingkungan eksternal dalam faktor juga mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan itu. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang

kondusif agar implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali.

Gambar 1.2

Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Horn



Sumber : (Van Meter dan Horn, 1975 dalam Anggara 2018 : 243)

1.6.6 Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan dalam kamus besar bahasa Indonesia pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain. Sementara istilah kata publik berasal dari bahasa Inggris yaitu public, arti publik dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa variasi pengertian, yaitu umum, masyarakat, dan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik diartikan sebagai barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Thoha (1993) dalam Rahawarin (2019) pelayanan Publik adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh

seseorang atau sekelompok orang, atau suatu lembaga terkait dalam memberikan dukungan dan fasilitas kepada suatu masyarakat untuk mencapai tujuannya.

Tujuan utama pelaksanaan pelayanan publik menurut Maulidiah (2014) oleh organisasi adalah terciptanya suatu tatanan pelayanan publik yang lebih baik bagi segenap unsur masyarakat atas persoalannya masing-masing terkait dengan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Suatu instansi atau lembaga dapat memberikan pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat yang diinginkan. Pelayanan yang tepat tersebut dapat memenuhi kebutuhan publik.

1.6.7 Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi berasal dari kata *innovation* yang artinya perubahan. Secara ensiklopedia inovasi adalah suatu hasil dari ide-ide berupa dalam bentuk produk atau layanan ketika dalam pelaksanaannya mengandung kemudahan. Defenisi inovasi oleh Damanpour yakni sebuah ide yang dilahirkan dalam suatu organisasi, misalnya berupa jasa, produk, teknologi, sistem struktur dan administrasi atau rencana baru (Yogi Suwarno, 2008:3).

Mulgan dan Albury dalam (dalam Yogi Suwarno 2008) menjelaskan inovasi dapat dinilai dari implementasi produk, proses, dan metode pelayanan yang baru atas hasil dari penggunaan metode lama yang lebih efektif dan efisien. Penyelenggaraan inovasi pemerintah mempunyai beberapa klasifikasi atau dengan nama lain yaitu tipologi inovasi Coyne

dalam (Suwarno, 2008) menyatakan bahwa inovasi dilaksanakan dengan tujuan terciptanya kualitas dalam pelaksanaan serta meningkatkan efisiensi untuk kemungkinan memperoleh profit dan pertumbuhan semakin tinggi.

Dari pengertian oleh beberapa pakar maka dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan sebuah upaya berupa terobosan yang dilakukan oleh pihak-pihak seperti instansi yang bertujuan untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi.

1.6.8 Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)

Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) merupakan sebuah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan, pemerintah yang efektif dan efisien serta negara yang berdaya saing. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018. Instruksi tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang diharapkan mendukung penuh program GISA dengan menciptakan ekosistem yang ideal dalam pelaksanaan GISA. Fokus Program GISA berorientasi pada :

- 1) Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
- 2) Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk;
- 3) Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan Sebagai Satu satunya Data yang Dipergunakan untuk Semua Kepentingan;

4) Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat yang Bahagia.

Kepemilikan dokumen kependudukan ini dalam artian pemerintah mewajibkan masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan secara lengkap seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), KTP Elektronik, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dilaksanakan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota. Penerapan GISA mengharuskan satu kecamatan terbentuk minimal satu desa/kelurahan sadar adminduk, satu kabupaten/kota harus terbentuk minimal satu kecamatan sadar adminduk, dan satu provinsi yang minimal terbentuk satu kabupaten/kota sadar adminduk

1.6.9 Inovasi Desa GISA

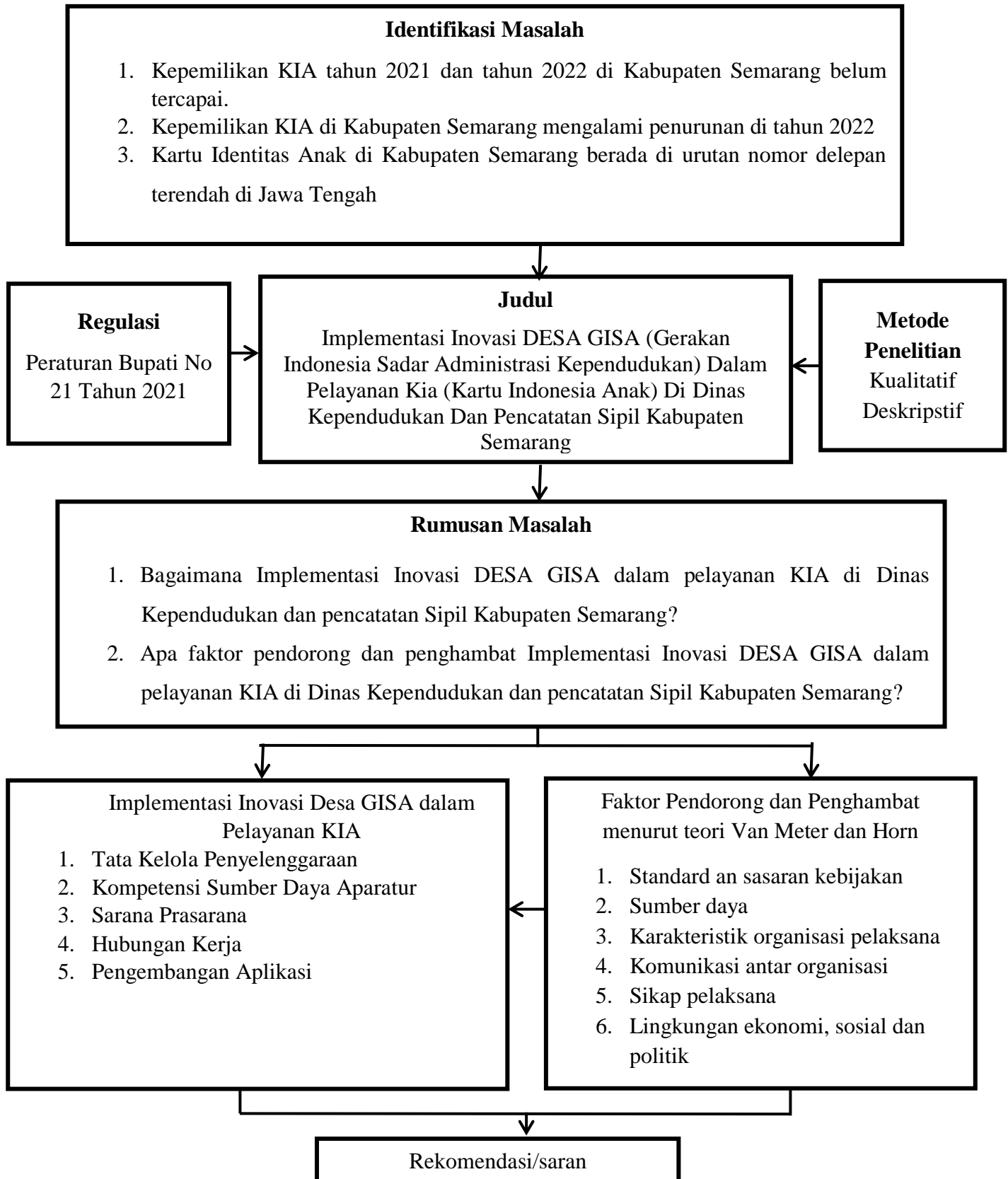
Inovasi Desa GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) merupakan salah satu inovasi dari dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Semarang dalam mendukung program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara nasional dan diatur dalam Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ Tahun 2018. Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Semarang No 21 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan Desa GISA (Gerakan Indonesia sadar Administrasi

Kependudukan) di wilayah Kabupaten Semarang. Tujuan dari adanya inovasi Desa GISA yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan;
- b. Meningkatkan peran serta Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil melalui pelayanan dokumen kependudukan di Desa/Kelurahan;
- c. Mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan; dan
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan.

1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1.3 Kerangka Berpikir



1.8 Fenomena Penelitian

Tabel 1.5 fenomena penelitian

Fenomena	Indikator yang diamati	Item
Mendeskripsikan Implementasi Inovasi Desa GISA dalam pelayanan KIA di Dispendukcapil Kabupaten Semarang	Tata Kelola Penyelenggaraan	suatu rangkaian kegiatan pelaksanaan dalam pelayanan inovasi Desa GISA yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme penyelenggaraan atau prosedur pelayanan - Sosialisasi
	Kompetensi sumber daya aparatur	tingkat kemampuan dan pengetahuan serta pengembangan aparatur dalam mendukung Inovasi Desa GISA. <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan dan pemahaman aparatur - Pengembangan aparatur
	Sarana prasarana	fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan inovasi sesuai dengan standar pelayanan. <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sarana prasarana - Kondisi sarana prasarana
	Hubungan kerja	koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh para aparatur dalam penyelenggaraan inovasi DESA GISA.

		<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk dan cara komunikasi
	Pengembangan inovasi	<p>proses pembuatan dan pengembangan inovasi sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembaharuan dan peningkatan inovasi
Mengidentifikasi Faktor pendorong dan penghambat	Standar dan sasaran kebijakan	<p>ukuran dan capaian yang harus ada pada setiap kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sop - Capaian
	Sumber daya	<p>Suatu kebijakan menuntut adanya ketersediaan sumber daya dalam memperlancar implementasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SDM pelaksana - Ketersediaan anggaran pendukung pelaksanaan kebijakan - Sarana prasarana pendukung
	Karakteristik organisasi pelaksana	<p>Karakteristik organisasi akan menentukan berhasil tidaknya suatu program diantaranya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola hubungan
	Sikap pelaksana	<p>karakteristik yang menempel erat kepada implementor</p>

		<p>kebijakan/program.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengetahuan, pemahaman dan pendalaman para pelaksana - Respon para pelaksana
	Komunikasi antar organisasi	<p>Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam terciptanya suatu kegiatan yang baik. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh implementors.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensitas komunikasi yang terjalin
	Lingkungan ekonomi, social, politik	<p>Sejauhmana lingkungan ekonomi, social, dan politik mendorong kebijakan yang telah ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan lingkungan social terhadap kebijakan - Dukungan politik - Dukungan ekonomi

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

1.9 Operasionalisasi Konsep

Implementasi Merupakan kegiatan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dengan tujuan untuk mensejahterakan, menertibkan, serta menanggulangi permasalahan yang terjadi. Implementasi juga dapat didefinisikan sebagai sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Inovasi Merupakan menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya. inovasi memiliki dasar aturan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang 31 Pemerintahan Daerah pada pasal 386 ayat 1 yang berisi “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi” dan pada ayat 2 yang berisi “Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Pembaharuan yang dimaksud adalah pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan pada ranah pemerintahan daerah. Implementasi Inovasi adalah bagaimana inovasi tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Implementasi inovasi melibatkan mengubah ide atau konsep baru menjadi produk, layanan, atau praktik yang dapat digunakan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Implementasi Inovasi Desa GISA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang terdiri dari :

1. Tata kelola penyelenggaraan merupakan suatu rangkaian kegiatan pelaksanaan dalam pelayanan inovasi Desa GISA yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Dalam hal ini meliputi :
 - Mekanisme atau prosedur pelayanan
 - Sosialisasi atau penyuluhan
2. Kompetensi sumber daya aparatur merupakan tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur dalam mendukung Inovasi Desa GISA. Sebuah inovasi dalam penyelenggaraannya harus didukung oleh aparatur yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan. Kompetensi sumber daya aparatur dapat dilihat melalui :
 - Kemampuan dan pemahaman aparatur
 - Pengembangan aparatur
3. Sarana prasarana merupakan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan inovasi sesuai dengan standar pelayanan. Bagian dari sarana prasarana meliputi :
 - Ketersediaan sarana prasarana
 - Kondisi sarana prasarana
4. Hubungan kerja merupakan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh para aparatur dalam penyelenggaraan inovasi DESA GISA. Bagian dari hubungan kerja meliputi :

- Bentuk dan cara komunikasi

5. Pengembangan inovasi merupakan proses pembuatan dan pengembangan inovasi sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan. Bagian dari pengembangan inovasi ini meliputi :

- Pembaruan dan peningkatan inovasi

Faktor pendorong dan penghambat implementasi iInovasi Desa GISA dalam pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang menurut teori Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan merupakan ukuran dan capaian yang haurs ada pada setiap kebijakan. standar dan tujuan harus dicantumkan dengan jelas supaya mudah untuk melaksanakan kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan dapat dilihat dari :

- SOP
- capaian

2. Sumber Daya merupakan suatu hal yang penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumber daya kebijakan yang dibuat tidak akan berjalan dengan baik dan tidak dapat menghasilkan suatu yang maksimal. Sumber daya dapat dilihat dari :

- Ketersedian sumber daya manusia
- Ketersedian anggaran
- sarana prasarna pendukung

3. Karakteristik Organisasi pelaksana merupakan pola hubungan serta pembagian tugas pada organisasi pelaksana inovasi desa GISA.

Karakteristik organisasi dilihat dari :

- Pola hubungan

4. Sikap pelaksana atau disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Sikap pelaksana dapat dilihat dari :

- Pengetahuan, pemahaman dan pendalaman para pelaksana

- respon para pelaksana

5. Komunikasi antar organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi. Komunikasi merupakan cara yang dilakukan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Komunikasi antar organisasi meliputi :

- Intensitas komunikasi yang terjalin

6. Lingkungan sosial, ekonomi, politik merupakan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan eksternal meliputi :

- Penerimaan lingkungan social terhadap kebijakan

- Dukungan politik

- Dukungan ekonomi

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan observasi terhadap permasalahan yang ada dan sasaran yang ingin dicapai. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti memilih pendekatan deskriptif kualitatif karena masalah yang diteliti memiliki tingkat kompleksitas dan dinamika yang tinggi, serta prosedur tindakan yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan fenomena yang teridentifikasi. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari narasumber harus dipilih dengan menggunakan metode yang lebih alamiah, misalnya dengan wawancara dengan informan yang dianggap memiliki pemahaman yang baik tentang permasalahan penelitian. Disamping itu, pendekatan ini juga berusaha untuk menghimpun informasi deskriptif mengenai perilaku, tulisan dan ucapan yang diamati dari subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjelaskan dan menganalisis implementasi inovasi desa GISA.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data yang sesungguhnya dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini mengambil lokasi berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang dianggap paham mengenai topik yang diteliti untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap paham mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu

- a. Kepala Bidang inovasi dan kerjasama
- b. Kepala bidang pendaftaran penduduk
- c. Kepala bidang umum dan sumber daya manusia
- d. Staf bidang inovasi dan kerjasama
- e. Operator Gisa di kecamatan
- f. Petugas registrasi Desa
- g. Masyarakat

1.10.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif karena data ini menjelaskan informasi terperinci dan mendalam yang di dapatkan dari berbagai narasumber sebagai subjek penelitian.

1.10.5 Sumber data

Sumber data menurut Sugiyono (2007) ialah semua hal yang bernilai informatif bagi kelangsungan penelitian terkait data penelitian. Sesuai dengan sumber data, maka dikelompokkan menjadi :

- a. Data Primer adalah informasi dimana diperoleh secara langsung berupa wawancara kepada sejumlah narasumber yang terpercaya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terkait dengan pelaksanaan inovasi desa Gisa dan faktor pendorong serta penghambatnya.
- b. Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi dari website dinas terkait, publikasi ilmiah dan peraturan terkait.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data bertujuan mendapatkan hasil penelitian dengan tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data tanya jawab antara peneliti dengan narasumber dengan tujuan memperoleh informasi. penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah ditulis secara sistematis mengenai Implementasi Program Gisa di Dispendukcapil Kabupaten Semarang.

- b. Observasi

Observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data dengan cara dilakukannya pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini

subjek penelitian diamati secara langsung dan data yang diperoleh dikumpulkan dalam bentuk foto atau dokumen. Observasi sendiri yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mengobservasi pelayanan pelaksana kepada masyarakat dan perilaku masyarakat penerima layanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data berbentuk gambar, video, maupun tulisan. Pada penelitian ini mengumpulkan dokumentasi berupa foto mengenai pelaksanaan inovasi desa GISA.

d. Studi Literature

Studi literatur dilakukan untuk teknik pengumpulna data dengan cara mempelajari dari referensi bukum maupun pada jurnal penelitian yang mampu mendukung penelitian ini Semarang.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Ahyar, dkk (2020) analisis data merupakan tindakan mengelompokkan data kedalam tingkatannya, mendeskripsikannya, mensintesisnya, mengorganisasikannya, memilih dan menggambarkannya secara sistematis, mengambil dan mengumoukan data dari wawancara catatan lapangan dan dokumen. Berikut ini proses analisis dan interpretasi data dalam penelitian tersebut antara lain :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan keluasan dan wawasan yang tinggi. Peneliti merekam semua data yang diperoleh dan kemudian memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan suatu gambaran yang lebih jelas mengenai Implementasi Inovasi DESA GISA dalam pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.

b. *Display data* (Penyajian Data)

Display data adalah Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Setelah data dirangkum peneliti akan menyajikan data dalam bentuk suatu uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan jenisnya, sehingga peneliti akan lebih muda menjelaskan mengenai hal yang telah diteliti dan dapat menarik sebuah kesimpulan atau analisis

c. Analisis Data

Atlas Ti merupakan sebuah aplikasi atau software yang digunakan dalam penilain kualitatif. Atlas Ti memiliki fungsi dalam membantu mengenai organisasi, kode, serta menganalisis data penelitian dengan terstruktur dan efisien. Aplikasi Atlas Ti

bekerja dalam membantu dari data seperti gambar, video, audio, artikel, survey maupun transkrip wawancara.

d. Kesimpulan atau Verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir proses analisis data dalam penelitian kualitatif adalah menarik berbagai kesimpulan dari berbagai permasalahan yang diteliti. Yaitu dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan gambaran mengenai Implementasi Inovasi DESA GISA dalam Pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.

1.10.8 Kualitas Data

Dalam melakukan penelitian kualitatif, kriteria validitas harus dipatuhi, dan penyesuaian ini disesuaikan agar penelitian yang dihasilkan memiliki tingkat validitas dan kepercayaan data yang tinggi, yang juga sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan Suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan atau informasi yang diperoleh.